

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korea Selatan adalah sebuah negara yang berada di kawasan Asia Timur, meliputi bagian selatan Semenanjung Korea. Secara ekonomi, Korea Selatan kini digolongkan menjadi negara dengan penghasilan menengah ke atas. Jika ditinjau dari latar belakang historis, Korea Selatan pernah mengalami fase keterpurukan dalam segi perkonomian.

Pasca Perang Saudara antara Korea Selatan dengan Korea Utara, Korea Selatan mengalami krisis ekonomi nasional. Korea Utara bahkan jauh mengungguli Korea Selatan baik dari segi perekonomian, militer, maupun pemerintahan. Keadaan ekonomi Korea Selatan sangat jatuh karena sebagian besar pemasukan mereka dikeluarkan lagi untuk kebutuhan perang. Selain itu, kebanyakan pabrik dan pusat industri pokok berlokasi di Korea Utara. Kemunduran Jepang dari Korea pun menyebabkan lenyapnya sebagian besar modal dan tenaga ahli dari perekonomian Korea. Pada masa pemerintahan kolonial Jepang, 94% modal dan 80% tenaga kerja dikuasai oleh Jepang (Yang&Mas'oe'd, 2007, hlm. 134).

Sampai dengan akhir tahun 1950-an, Korea Selatan dikategorikan sebagai salah satu negara yang *underdeveloped*, di mana

tingkat kemiskinan dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sangat tinggi. Perekonomian negara bergantung pada sektor pertanian dengan nilai total ekspor US\$ 41 juta dan pendapatan per kapita US\$ 82 saat itu. Dengan mengutip pendapat Cole dan Lyman, sejak tahun 1953 hingga 1958, Korea Selatan menerima bantuan Amerika Serikat tidakkurang dari US\$ 270. Ini sama dengan US\$ 12 penghasil per kapita per tahun atau sekitar 15% produk kotor nasional Korea (Suwarsono&So, 1991, hlm. 148).

Data lainnya yang disusun Bank Ekspor-Import Korea menyebutkan Pemerintah Korea mendapat bantuan sebanyak 3,02 milyar dollar Amerika selama 15 tahun antara 1945 s/d 1960 (Cha, 2008). Selain dari bantuan gratis itu, Amerika Serikat memberikan bantuan militer tersendiri sejumlah 1,3 milyar dollar Amerika sampai tahun 1959. Jumlah bantuan gratis dari Amerika ke Korea Selatan sampai tahun 1960 mencapai 4,32 milyar dollar Amerika. Kebanyakan bantuan gratis non militer itu segera ditukar dengan mata uang Korea dan digunakan untuk mengimpor bahan-bahan makanan dan bahan-bahan lain yang bersifat konsumtif.

Ketergantungan Korea Selatan terhadap Amerika Serikat sama sekali tidak merugikan Korea Selatan, bahkan cenderung menguntungkan. Amerika sangat membantu Korea Selatan untuk menjalin hubungan dagang dengan negara-negara maju lainnya. Hal ini memberikan peluang besar bagi Korea Selatan agar ekspor produk yang

dihasilkan di negaranya dapat dengan mudah diterima di negara-negara yang sangat berpengaruh pada stabilitas perekonomian dunia.

Pembangunan ekonomi Korea Selatan mulai stabil saat masa Presiden Park Chung Hee yang meluncurkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pertama periode 1962-1966. Periode ini dianggap paling penting karena pada periode ini pemerintah Korea Selatan membuat kebijakan dasar pembangunan ekonomi periode-periode berikutnya. Selain itu, Korea Selatan menghadapi situasi makin berkurangnya bantuan pembangunan dari Amerika Serikat sehingga pemerintah merasa perlu untuk menciptakan ekonomi yang mandiri. Tujuan awal dari Repelita pertama adalah untuk merevitalisasi ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Anwar, 2010, hlm. 88).

Langkah-langkah yang diambil Park awalnya bersifat coba-coba dan banyak mengalami kegagalan. Upaya pemerintah untuk memobilisasi modal domestik dan meningkatkan investasi dengan membangun proyek-proyek investasi terkesan ambisius dan tidak berhasil seperti yang diharapkan, bahkan menipiskan cadangan devisa negara. Menyadari hal tersebut, Park merevisi Repelita 1 pada 1964 dan lebih menekankan pada kebijakan stabilisasi keuangan. Strategi industrialisasi diubah menjadi strategi pembangunan yang lebih berorientasi ke luar (*outward looking development strategy*) yang berbasis ekspor barang manufaktur padat karya.

Strategi ini dilengkapi dengan kebijakan kuota impor, yaitu pembatasan impor dengan cara memberikan pajak impor yang lebih rendah untuk barang-barang modal dan bahan baku. Selanjutnya, untuk membuat dana-dana yang tersebar dan tidak terorganisir di masyarakat menjadi terkumpul dalam lembaga keuangan, pemerintah meningkatkan suku bunga tabungan diikuti dengan kenaikan suku bunga pinjaman agar penggunaan kredit perbankan lebih efisien.

Kebijakan-kebijakan ini berhasil membuat perusahaan-perusahaan Korea Selatan milik para wirausaha baru dapat menjalankan kegiatan usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, memproduksi dan menjual produk-produk yang padat karya. Tingkat teknologi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan baru tersebut relatif sederhana. Barang-barang yang permintaannya selalu ada dengan kualitas sudah standar seperti rambut palsu, bulu mata palsu, tekstil, sepatu, dan kayu lapis dijadikan pemerintah sebagai industri prioritas karena sumber daya manusianya melimpah dan keterampilan yang diperlukan relatif rendah.

Repelita pertama ini dijalankan dengan baik dan sangat serius, misalnya dengan menerapkan target pertumbuhan ekonomi dan target output sektoral, menetapkan jumlah investasi domestik dan asing yang diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Repelita ini akhirnya dilanjutkan sampai dengan puncaknya yaitu pada Repelita 3, pemerintah melancarkan gerakan baru bernama “Saemaul Undong” yang bisa dikatakan sebagai titik balik perekonomian Korea Selatan.

Dikutip dari www.adb.org, pada tahun 1960, pendapatan per kapita Korea Selatan tidak jauh berbeda dengan Indonesia yakni US\$ 79 (low income country). Namun, selama 1970-2002 rata-rata pertumbuhan ekonomi mampu mencapai 7,2 persen per tahun sehingga kinerja ini mampu meningkatkan pendapatan per kapita sebesar 180 kali lipat menjadi US\$ 12.638 di tahun 2003. Tahun 2013, pendapatan per kapita Korea Selatan mencapai sekitar US\$ 26.000 dan masuk dalam jajaran negara-negara berpendapatan tinggi.

Perkembangan ekonomi Korea Selatan membuktikan kebenaran tahapan pembangunan Rostow yang ditulisnya dalam buku *Stages of Economic Growth*, yang terdiri dari masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas/tinggal landas, menuju kedewaan dan era konsumsi tinggi. Menurut rumusan tahapan pembangunan ini, Korea Selatan kini telah berada pada tahap menjelang kematangan, bukan lagi sekedar pada kondisi tinggal landas, apalagi teknologi Korea Selatan saat ini sudah sangat diperhitungkan sehingga tidak lama lagi negara ini akan sampai pada tahap perekonomian matang.

Sementara itu, di kisaran tahun yang sama, Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat ketentuan-ketentuan dari KMB setelah pengakuan kedaulatan, yaitu beban utang luar negeri sebesar Rp. 1.500 juta dan utang dalam negeri sebesar Rp. 2.800 juta. Ekspor masih tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan. Masalah jangka pendek yang harus diselesaikan oleh

pemerintah adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Masalah jangka panjangnya yaitu masalah pertumbuhan penduduk dan tingkat hidup yang rendah. Defisit pemerintah pada waktu itu sejumlah Rp 5,1 miliar. Defisit ini berhasil dikurangi sebagian dengan pinjaman pemerintah sebesar Rp 1,6 milyar pada 20 Maret 1950 dan dari Uni Indonesia-Belanda sebesar Rp 200 juta.

Akibat dari pecahnya Perang Korea, ekspor RI meningkat dan pemerintah RI berusaha mendapatkan pinjaman dari luar negeri yang dimaksudkan untuk pembangunan prasarana ekonomi. Misi Menteri Kemakmuran Ir. Djuanda ke Amerika Serikat berhasil mendapat kredit dari *Exim Bank of Washington* sejumlah US\$ 100.000.000. dari jumlah tersebut, sekitar US\$ 52.245.000 direlisasikan untuk proyek angkutan otomotif, pembangunan jalan, telekomunikasi, pelabuhan, kereta api, dan perhubungan udara.

Sejak 1951, pendapatan negara mulai berkurang karena menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia tidak memiliki barang untuk diekspor kecuali hasil perkebunan, sehingga perekonomian bukannya menuju kestabilan, malah sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh tidak stabilnya situasi politik dalam negeri akibat biaya untuk operasi keamanan dalam negeri, dan pemerintah pun tidak berhasil meningkatkan produksi dengan menggunakan sumber-sumber yang masih ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kelemahan

lainnya, politik keuangan Indonesia tidak dirancang di Indonesia, melainkan di Netherland (Wardhana, 1962, hlm. 30). Defisit pun tidak berhasil dihindari.

Karena defisit ini, ada kecenderungan untuk mencetak uang baru, yang menimbulkan tendensi inflasi. Sejak tahun 1953 defisit anggaran belanja pemerintah sebesar Rp 3.047 juta dan peredaran uang berjumlah Rp 7,6 miliar. Defisit terus terjadi hingga tahun 1958. Selain itu, karena kelangkaan defisa, semua devisa dikuasai pemerintah dengan cara melarang warga negara memiliki devisa. Eksportir diharuskan menjual devisa kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan, misalnya Rp 10 per dollar AS (Gie, 1999, hlm. 223).

Untuk mengatasi defisit, ditempuhlah kebijakan Plan Sumitro pada masa Kabinet Natsir, yang berfokus pada industrialisasi, ditekankan pada pembangunan industri dasar seperti pendirian pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan (Po, 1955, hlm. 1). Kabinet selanjutnya adalah kabinet Ali Sastroamidjoyo, membuat Biro Perancang Negara dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini dipimpin Ir Djuanda, yang kemudian pada Mei 1956 menghasilkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956-1961. Namun RPLT ini kemudian diubah prioritasnya pada 1957 karena adanya perubahan politik dan ekonomi baik di Indonesia maupun di dunia. Depresi di Amerika Serikat dan Eropa Barat saat itu memundurkan pendapatan negara, karena harga barang ekspor bahan

mentah merosot. Selain itu, ketegangan politik yang timbul tidak dapat diredakan lagi dan akhirnya pecahlah Pemberontakan PRRI/Permesta.

Untuk menumpas pemberontakan ini diperlukan biaya yang besar juga pikiran yang fokus, sehingga dampak langsungnya adalah meningkatnya defisit dan angka ekspor menunjukkan angka menurun. Presentasi defisit dari 20% meningkat menjadi 100%. Kekacauan ini melahirkan inflasi, yang berusaha diatasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1959 tentang pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

Peraturan itu diikuti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 6/ 1959 yang isi pokoknya adalah ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp 1.000,- dan Rp 500,- yang masih berlaku harus ditukar dengan uang kertas bank baru sebelum 1 Januari 1960. Selain itu, pemerintah juga menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah serta memperketat pengawasan semua pelaksanaan anggaran belanja, juga ada penertiban manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara baik yang lama maupun yang baru diambil alih dari kepemilikan Belanda.

Dengan beberapa tindakan ini, pemerintah berhasil mengendalikan inflasi dan mencapai keseimbangan moneter. Namun, keberhasilan ini hanya berjalan selama 4 bulan. Peredaran uang yang pada akhir Juli 1959 berjumlah Rp 33.987 juta, naik menjadi Rp 34.883

juta pada Desember 1959, dan naik lagi menjadi Rp 47.847 juta pada akhir 1960, yaitu 37% lebih tinggi dari tahun 1959.

Ketidakberhasilan kebijakan-kebijakan moneter pemerintah ini disebabkan pemerintah tidak mempunyai kemauan untuk menahan diri dalam pengeluaran-pengeluarannya. Untuk menyelenggarakan apa yang dikenal dengan proyek Mercusuar, seperti Ganefo (*Games of the New Emerging Forces*) dan Conefo (*Conference of the New Emerging Forces*), pemerintah terpaksa mengadakan pengeluaran-pengeluaran yang lebih besar setiap tahunnya. Inflasi kembali terjadi dan semakin tinggi hingga mencapai 200-300% pada tahun 1965.

Perekonomian Indonesia mengalami masa yang buruk, pendapatan riil per kapita di tahun 1966 sangat mungkin lebih rendah dari tahun 1938. Tingkat produksi dan investasi di berbagai sektor utama menunjukkan kemunduran semenjak tahun 1950. Di awal dasawarsa ini defisit anggaran belanja negara mencapai 50% dari pengeluaran total negara, dan penerimaan ekspor sangat menurun. Sejumlah ahli ekonomi dari Universitas Indonesia dan pelajar Indonesia di luar negeri ditarik untuk dijadikan sebagai penasehat ekonomi pemerintah, dan beberapa di antaranya menduduki jabatan penting di kabinet (Booth dan McCawley, 1982, hlm.1).

Jika kita amati dan bandingkan, pasca kemerdekaan Indonesia dan Korea Selatan memiliki kondisi perekonomian yang hampir sama, terutama dikisaran tahun 1950-1960an. Pendapatan per kapita kedua

negara ini pun mirip, Indonesia dengan angka US\$ 100 dan Korea Selatan dengan angka US\$79. Dilihat dari sisi ini, Indonesia ternyata lebih unggul dari Korea Selatan pada saat itu. Tapi, keunggulan Indonesia itu tidak bertahan lama, karena harus menghadapi krisis dalam negeri berupa hiperinflasi dan defisit anggaran negara.

Hal ini jelas berimbas pada perkembangan perekonomian kedua negara pada tahun-tahun berikutnya. Korea Selatan mengalami perkembangan terus menerus, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Kunci dari perkembangan ini ada pada pilihan strategi kebijakan ekonomi, yang memberikan perhatian besar pada pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, serta investasi agresif di kegiatan penelitian dan pengembangan.

Sedangkan Indonesia, yang mengalami hiperinflasi dan defisit pada rezim Orde Lama, tidak dapat berkembang seluas Korea Selatan. Meski pada rezim Orde Baru ada beberapa perkembangan perekonomian yang berhasil dicapai, seperti swasembada pangan, namun tetap tidak menuju arah perekonomian negara maju. Buktinya, Indonesia hingga saat ini masih dinobatkan menjadi salah satu negara berkembang di dunia.

Pada pertengahan tahun 1997, terjadi sebuah peristiwa besar yang menggoyahkan ekonomi beberapa negara di Asia yang sedang mencoba untuk tumbuh pesat. Peristiwa itu adalah krisis keuangan yang terjadi di Thailand. Krisis ini dengan cepat menyebar ke negara Asia

yang lain seperti Indonesia, Malaysia, dan tak luput Korea Selatan yang disebut-sebut sebagai salah satu *Asian Tigers* pun terkena imbasnya. Korea Selatan sempat mengalami guncangan perekonomian, tapi pemerintah dapat mengambil langkah yang bisa menyelamatkan ekonomi negara. Kim Dae Jung selaku presiden Korea Selatan saat itu berhasil bertindak cepat dan cerdas dalam mengatasi krisis.

Tidak hanya pemerintah, ternyata seluruh lapisan masyarakat Korea Selatan bersatu padu dalam upaya mengatasi krisis dengan cepat dan tepat. Dengan semangat rela berkorban dan pemikiran tidak mau terjatuh di lubang yang sama, Korea Selatan berhasil bangkit lebih cepat dari krisis dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia dan Thailand. Bahkan di tahun 2001, semua hutang negara pada IMF telah tuntas terbayar. Korea Selatan pun melanjutkan kembali pembangunan ekonominya dan pada tahun 2002 berhasil menjadi tuan rumah World Cup bersama dengan Jepang.

Indonesia yang pada saat itu disebut-sebut menjadi salah satu macam Asia bersama dengan RRC, Korea Selatan, dan Singapura ternyata tidak luput dari krisis. Setelah 32 tahun kepemimpinan Presiden Soeharto, tuntutan untuk perubahan yang ditandai dengan banyaknya gerakan reformasi menuntut perbaikan pada kehidupan politik dan demokratisasi di samping kehidupan ekonomi yang baru saja terpuruk semakin meluas. Pada era ini, pemerintahan rezim orde baru yang awalnya baik, khususnya apabila dilihat dari segi peningkatan

kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada dekade 1980-an sampai awal 1990-an, akhirnya mengalami krisis moneter yang melanda kawasan Asia tahun 1997 (Finaldin&Iskandar, 2006, hlm. 178) Soeharto pun terpaksa lengser karena berbagai tuntutan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi, salah satunya tuntutan mengatasi Krisis Moneter. Retnowati Abdulgani mengatakan bahwa kekuasaan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto jatuh saat negara menghadapi krisis ekonomi : masa Presiden Soekarno inflasi mencapai 600 persen dan masa Presiden Soeharto rupiah jatuh ke nilai Rp.17.000,00 per US dollar (2007, hlm. 217).

Keadaan kedua negara ini membuat penulis bertanya-tanya. Mengapa Korea Selatan lebih cepat keluar dari krisis moneter? Apa saja kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea Selatan dan Indonesia dalam mengatasi krisis? Akhirnya, berdasarkan keingintahuan mengenai hal tersebut, penulis berencana menulis suatu karya ilmiah dengan judul “Penyelesaian Krisis Ekonomi 1997-2001 di Korea Selatan dan Indonesia: Sebuah Perbandingan”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu “Bagaimana Upaya Korea Selatan dan Indonesia dalam Mengatasi Krisis di Negaranya?”, dan dari pokok permasalahan tersebut, penulis memecahnya ke dalam beberapa rumusan masalah di bawah ini:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya Krisis Ekonomi Asia tahun 1997?
2. Bagaimana upaya penyelesaian Krisis Ekonomi Asia 1997-2001 di Korea Selatan?
3. Bagaimana upaya penyelesaian Krisis Ekonomi Asia 1997-2001 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia?
4. Faktor apa sajakah yang menyebabkan adanya perbedaan dalam kecepatan dan keberhasilan kedua negara dalam menghadapi Krisis Ekonomi Asia 1997-2001?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis bertujuan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi latar belakang terjadinya Krisis Ekonomi Asia tahun 1997.
2. Menganalisis upaya penyelesaian Krisis Ekonomi Asia 1997-2001 di Korea Selatan.
3. Menganalisis upaya penyelesaian Krisis Ekonomi Asia 1997-2001 yang dilakukan pemerintah Indonesia.
4. Menyimpulkan faktor apa saja yang menyebabkan adanya perbedaan dalam kecepatan dan keberhasilan kedua negara dalam menghadapi Krisis Ekonomi Asia 1997.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah penulis sampaikan di atas, penulis mengharapakan karya sejarah yang akan ditulis dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan, sebagai berikut :

1. Manfaat akademis : diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai sejarah perekonomian Korea Selatan dan Indonesia khususnya di masa Krisis Moneter tahun 1997, memberikan informasi mengenai upaya penyelesaian Krisis Ekonomi Asia 1997 di Korea Selatan dan Indonesia, menyajikan hasil analisis penulis tentang faktor yang menyebabkan perbedaan dalam kecepatan dan keberhasilan upaya penyelesaian krisis di kedua negara dan menambah koleksi karya tulis ilmiah Mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah UPI, serta menjadi bahan bacaan bagi kalangan civitas akademika maupun kalangan umum mengenai sejarah perekonomian Korea Selatan dan Indonesia khususnya di masa krisis moneter 1997.
2. Manfaat praktis :
 - 1) Untuk kalangan umum diharapkan skripsi ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penulis lainnya.

- 2) Untuk pendidikan, diharapkan skripsi ini bisa digunakan untuk bahan ajar bagi K.D. 3.6 : Menganalisis pengaruh Perang Dunia I dan II terhadap kehidupan politik global (sejarah peminatan kelas XI.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam kerangka penulisan pedoman karya ilmiah UPI tahun 2015, struktur organisasi penulisan skripsi terdiri dari.

Bab I Pendahuluan dalam pedoman penulisan karya ilmiah UPI tahun 2015 mengadaptasi dari Evans, Gruba dan Zobel (2014) dan juga Paltridge dan Starfield (2007) yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan, manfaat, dan struktur organisasi skripsi. Di latar belakang, penulis akan memaparkan mengapa penulis merasa perlu menulis tentang kebijakan penyelesaian Krisis Moneter 1997 di Korea Selatan dan Indonesia, dan bagaimana kira-kira urgensi hal ini sehingga perlu diteliti.

Bab II Kajian Pustaka atau landasan teoretis dalam skripsi, tesis, atau disertasi memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bagian ini memiliki peran yang sangat penting. Melalui kajian pustaka ditunjukkan *the state of the art* dari teori yang sedang dikaji dan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Dalam bab II penulis akan menyampaikan konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan kebijakan

penyelesaian Krisis Moneter 1997 di Korea Selatan dan Indonesia, juga akan memaparkan penelitian terdahulu yang bisa berupa buku, jurnal, maupun skripsi.

Bab III Metode Penelitian merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan.

Bab IV Temuan dan Pembahasan menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan cara uraian padat.

